

Tinjauan Hukum Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses Pemakzulan Presiden Menurut UUD NRI 1945

Abstrak

Kajian ini menganalisis kontribusi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam prosedur pemberhentian konstitusional Presiden menurut UUD NRI 1945. Dalam arsitektur kelembagaan Indonesia yang mengadopsi distribusi kekuasaan demokratis, partisipasi komprehensif institusi negara menjadi esensial untuk mempertahankan ekulibrium otoritas. Namun, DPD sebagai lembaga representasi daerah belum memiliki kewenangan signifikan dalam proses impeachment, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterlibatan DPD dalam pemakzulan berpotensi mencederai prinsip *checks and balances* dan melemahkan sistem bikameralisme. Studi perbandingan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Prancis memperlihatkan bahwa senat atau lembaga serupa DPD memiliki peran sentral dalam proses *impeachment*. Oleh karena itu, diperlukan amandemen konstitusi maupun revisi peraturan perundang-undangan agar DPD memiliki peran substantif dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya yang menyangkut legitimasi dan akuntabilitas kekuasaan eksekutif. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi yang representatif dan menjamin keterlibatan daerah dalam proses politik nasional.

Keywords: *checks and balances*; Dewan Perwakilan Daerah; *impeachment*; system ketatanegaraan; Undang-Undang Dasar 1945.